BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kota Surakarta sebagai salah satu Kota yang ikut terlibat pada Pemilukada serentak tahun 2015, total keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 400.134 pemilih dengan total jumlah pemilih kaum difabel mencapai 1.085 pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta membukukan tingkat partisipasi pemilih kaum difabel sebesar 38,25% di Pemilukada serentak tahun 2015. Dari total 1.085 pemilih, hanya 415 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Hasil ini terbilang rendah dibandingkan dengan target dari KPU Surakarta terhadap partisipasi pemilih kaum difabel sebesar 75%. Hasil tersebut juga jauh dari tingkat partisipasi pemilih secara umum di Surakarta yaitu sebesar 73,65%.

Penulis melakukan penelitian mengenai "Persepsi Politik Pemilih kaum difabel (*Different Ability*) Terhadap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015" guna mengetahui seperti apa pandangan pemilih kaum difabel pada Pemilukada tahun 2015 lalu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi politik pemilih kaum difabel berdasarkan penelitian dengan total 51 responden yang telah dilaksanakan menunjukkan angka yang tinggi atau dapat dikatakan sudah baik, sehingga H1 terbukti. Pada indikator pengetahuan mengenai Pemilukada mendapat nilai rata-rata 72,62% dengan memperoleh

predikat baik. Pada indikator keterlibatan mendapat nilai rata-rata 81,89% dengan memperoleh predikat baik. Pada indikator aksesibilitas mendapat nilai rata-rata 75% dengan memperoleh predikat baik. Selanjutnya pada indikator penilaian mendapat nilai rata-rata 76,94% dengan memperoleh predikat yang juga baik.

2. Untuk presentase pada masing-masing poin disetiap indikator, pengetahuan mengenai waktu pelaksanaan Pemilukada menempati posisi terendah pertama yaitu memperoleh nilai rata-rata 58,8%, hal ini dapat dipengaruhi oleh pemilih kaum difabel Kota Surakarta yang masih belum mengetahui secara pasti waktu pelaksanaan Pemilukada atau ragu karena telah lupa pada waktu pelaksanaan Pemilukada.
3. Poin terendah kedua yaitu keaktifan dalam suatu organisasi pada indikator keterlibatan yang memperoleh nilai rata-rata 60,78%. Keaktifan dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki pemilih kaum difabel mengenai Pemilukada dan juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih kaum difabel pada saat Pemilukada. Berdasarkan pengamatan penulis, KPU dalam memberikan sosialisasi mengenai Pemilukada lebih mencari pada organisasi maupun kelompok atau komunitas penyandang disabilitas. Dari organisasi maupun komunitas tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan informasi yang sama kepada teman-temannya di luar organisasi mengenai sosialisasi Pemilukada, karena setidaknya organisasi tersebut lebih mengetahui seperti apa penyampaian yang baik sehingga mudah untuk dipahami oleh pemilih kaum difabel.

4. Poin terendah ketiga yaitu kehadiran dalam sosialisasi yang memperoleh nilai rata-rata 64,7% pada indikator aksesibilitas. Ketidakhadiran pemilih kaum difabel pada sosialisasi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi absennya pemilih pada saat pemilihan, pemilih kaum difabel merasa kurang mendapatkan informasi dan enggan atau khawatir untuk pergi ke TPS dengan keterbatasan yang dimilikinya.
5. Masih ada TPS yang belum *aksesible*, selain dari sarana yang belum sepenuhnya mendukung pemilih kaum difabel, pelayanan yang diberikan petugas TPS juga dirasa masih kurang mengerti bagaimana dan seperti apa saat berhadapan dengan pemilih kaum difabel.

4.2. Saran

Selain memberikan pertanyaan untuk memenuhi indikator-indikator persepsi, penulis juga memberikan pertanyaan mengenai saran yang diberikan untuk Pemilukada selanjutnya dalam kuesioner. Saran-saran yang diberikan penulis tampung dan dilakukan rekapitulasi untuk menghindari saran yang ganda. Hasil rekapitulasi saran secara keseluruhan mengenai Pemilukada dari 51 responden, menghasilkan 5 poin sebagai berikut:

1. Ada sedikit inovasi pada saat pembekalan KPPS, dengan menghadirkan perwakilan dari pemilih kaum difabel. Diharapkan dengan menghadirkan perwakilan dari pemilih kaum difabel dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana dan seperti apa seharusnya memberikan pelayanan kepada pemilih kaum difabel sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki.

2. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan dan perbaikan dari mulai sosialisasi Pemilu hingga kesiapan sarana dan prasarana TPS yang mempermudah pemilih kaum difabel. Karena tidak semua difabel mendapat sosialisasi contohnya difabel yang tidak aktif disuatu organisasi. Untuk sarana dan prasarana TPS juga diharapkan sesuai dengan keterbatasan pemilih kaum difabel yang memilih di TPS tersebut.
3. Jenis disabilitas dalam data pemilih diperjelas untuk mempermudah pada saat pemilihan. Pada saat pendataan pemilih perlu untuk dicantumkan jenis keterbatasan yang dialami oleh pemilih kaum difabel sehingga TPS tempatnya memilih dapat menyesuaikan. Ada kejadian pemilih tuna rungu dipanggil saat pemilihan dan tuna daksa digendong oleh petugas keamanan (Linmas) saat ingin masuk TPS.
4. Pemilih kaum difabel didahulukan dan diberikan kemudahan dalam memilih.
5. Ada logistik untuk pemilih dan ketersediaan transportasi bagi pemilih kaum difabel yang jauh dari TPS atau adanya petugas yang secara khusus mendatangi rumah/tempat pemilih kaum difabel (jemput bola).

Secara garis besar, banyak dari responden yang memberikan saran mengenai TPS yang lebih akses untuk pemilih kaum difabel. Pelayanan pada TPS pun lebih ditingkatkan terutama jika ada pemilih kaum difabel, dan petugas yang berada di TPS diharapkan sudah mengetahui hambatan yang dialami oleh pemilih kaum difabel sehingga tepat dalam respon yang diberikan. Responden pun memberikan saran terkait adanya logistik dan transportasi bagi pemilih kaum

difabel, hal ini juga perlu disesuaikan dengan kemampuan dari penyelenggara pemilihan sendiri.